

Kawal Dugaan Pelanggaran Para Kades, Petisi Brawijaya Ancam Laporkan Bawaslu ke DKPP

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Warga yang mengatasnamakan Petisi Brawijaya Nasional (BTN) kembali melaporkan dugaan pelanggaran yang mengerahkan Asosiasi Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) [Kabupaten Serang](#) untuk mendukung salah satu calon di Pilkada Banten ke [Bawaslu](#) Banten.

Mereka mendesak Bawaslu Banten untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Bahkan mereka mengancam akan melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ([DKPP](#)).

Ketua Petisi Brawijaya Nasional (PBN), Haposan Situmorang mengatakan, pihaknya melaporkan pelanggaran salah satu paslon Pilkada Banten 2024 ke [Bawaslu](#) Banten Selasa 15 Oktober 2024.

**Baca Juga: [Terpidana Korupsi LPDB Lebak Kembalikan Uang Pengganti](#)

Pelaporan ini berdasarkan temuan tim monitoring media petisi Brawijaya tentang aksi bagi-bagi uang (sawer) oleh salah satu kontestan Pilkada Banten. Kemudian, pengerahan anggota APDESI

di Kabupaten Serang oleh Timses salah satu calon untuk mendukung calon tertentu dan pernyataan beberapa kepala desa untuk mendukung salah satu calon tertentu.

“Kami meminta Bawaslu Provinsi Banten menindaklanjuti pengaduan dimaksud dengan minta keterangan dari pihak-pihak terkait, serta meminta Bawaslu Banten untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya di Propivsi Banten,” kata Haposan kepada awak media, Kamis (17/10/2024).

Haposan mengatakan, apabila Bawaslu Banten tidak menindaklanjuti pengaduan yang telah dilaporkan, maka pihaknya akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap Bawaslu Banten.

“Kalau ini tidak ada tindaklanjutnya ya kami akan melaporkan Bawaslu kepada instansi terkait seperti halnya DKPP, yakni atas sikap Bawaslu yang tidak menindaklanjuti pengaduan yang diadakan,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi Tampung Demokrasi Masyarakat melaporkan Ketua APDESI Kabupaten Serang terkait dugaan mendukung pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah dan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Serang Ratu Zakiyah-Najib Hamas.

“Di sini yang kita laporkan itu yang pertama Ketua Apdesi Kabupaten Serang, kemudian calon Gubernur nomor urut 2 Andra Soni kemudian ketiga calon Bupati Serang Ratu Zakiyah,” ucap Sandi.

Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Badrul Munir membenarkan laporan tersebut. “Iya tadi ada yang menyampaikan laporan,” katanya singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

**Baca Juga: [Pernyataan Dimyati Perempuan Berat Jadi Gubernur Disoal](#)

Pihaknya akan lebih dahulu memeriksa kelengkapan laporan sebelum melakukan tindak lanjut pemeriksaan

“Selanjutnya kami akan melakukan kajian awal atas laporan tersebut untuk memeriksa kelengkapan syarat formil dan materilnya, jenis dugaan serta apakah sudah pernah ditangani pada tingkat tertentu,” ucap Badrul Munir. (Aep)

Pemprov Banten Beri Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar untuk Mitra Deradikalisasi

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Kabar6-Sebanyak 14 mitra deradikalisasi mendapatkan pelatihan budidaya ikan air tawar dari Kesbangpol dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Pemprov Banten, juga melibatkan Bais TNI.

Lokasi pelatihan berada di UPTD Produksi dan Pengembangan Perikanan Budidaya, DKPP Banten di Desa Curug Barang Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada 05-06 Agustus 2024.

Budidaya ikan air tawar dilatih langsung oleh Rivky Octova,

selaku Kasie Produksi UPTD P3B. Usai mengikuti pelatihan, para mitra deradikalisasi mendapatkan bantuan benih ikan.

****Baca Juga: [Peluang Bisnis yang Menjanjikan, Pemuda Desa Tempirai Buka Usaha Karang Bunga](#)**

“Selain pemberian pelatihan, sertifikat pelatihan, para peserta juga diberikan bantuan benih ikan agar ilmu yang didapat dari pelatihan dapat segera diimplementasikan secara langsung,” ujar Erwin Damayanto, Kepala UPTD Produksi dan Pengembangan Perikanan Budidaya (P3B) DKP Banten, ditulis Selasa, (06/08/2024).

Pelatihan dan bantuan benih ikan tawar itu diharapkan bisa membantu perekonomian mitra deradikalisasi, sehingga mereka bisa lebih baik lagi kehidupannya.

Selama pelatihan budidaya ikan air tawar ke mitra deradikalisasi, juga di hadiri langsung oleh Epi Rustam selaku Sekban Kesbangpol dan bersama dengan Subhan sebagai Plt. Kabid Wasnas Kesbangpol.

“Pelatihan tersebut diharapkan masyarakat mitra deradikalisasi sebagai peserta dapat menimba ilmu tentang budidaya ikan, yang berguna sebagai salah satu peluang memperbaiki perekonomian keluarga,” terangnya.

Pelatihan budidaya ikan air tawar ke mitra deradikalisasi juga sebagai bentuk pembinaan dan kasih sayang pemerintah kepada masyarakat Indonesia, terutama peserta pelatihan.

“Kegiatan tersebut juga merupakan upaya nyata bahwa, pemerintah hadir dalam mencari solusi bagi permasalahan ekonomi yang kerap dihadapi oleh masyarakat mitra deradikalisasi,” jelasnya.(Dhi)

Pemkab Serang dan Chandra Asri Tekan MoU Penanaman Mangrove di Lahan 100 Hektare

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan PT. Chandra Asri Pasifik kembali melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama di Pendopo Bupati Serang, Senin 10 Juni 2024. Salah satu tujuan MoU tersebut adalah rencana penanaman mangrove di lahan seluas 100 hektare di Kabupaten Serang.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Direktur Legal Eksternal Affairs PT Chandra Asri Pasifik (CAP) Edi Riva'i. Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda), Nanang Supriatna, Inspektur, Rudi Suhartanto, Kepala

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Suhardjo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Prauri.

Tatu mengatakan kerjasama dengan Chandra Asri bukan kali pertama. Sebab Pemkab Serang sudah sejak lama bekerjasama dengan PT CAP dan juga dengan dinas di Pemkab Serang. **Baca Juga: [Warga Kampung Ciapus Sukamulya Tutup Akses Jalan ke Pembuangan Sampah Lliar](#)

"Kita tarik ke belakang chandra asri juga bergerak bersama Pemda Serang dalam bidang pendidikan disana ada D3 vokasi, kita juga ingat di bidang kesehatan ketika Covid full chandra asri backup Pemkab Serang bantu yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian sedang terus berjalan juga pos gizi posyandu," ujarnya kepada wartawan.

Kemudian kata dia dalam bidang lingkungan hidup chandra asri juga terus ikut serta dalam mencari solusi mengenai sampah. Dimana untuk sampah plastik misalnya chandra asri sudah mengambil bagian. Baik yang masih bernilai dan tidak bernilai bisa dilanjutkan ke chandra asri.

"Hanya saja ini tinggal pembinaan kita ke bawah para kades, RT RW untuk mereka bisa kelola sampah," katanya.

Selain itu untuk lingkungan ada program konservasi dan transplantasi karang di Pulau Panjang. Chandra asri dalam membuat program tidak sekali putus tapi berkelanjutan sifatnya.

"Terus masalah sampah plastik tadi untuk di pesisir waktu itu saya bersama sama di Anyer Cinangka Pantai Paku memberikan bantuan perahu pada nelayan. Perahu itu selain berikan bantuan untuk melaut mencari ikan mereka sekalian bersihkan laut, pantai, jadi sampah plastik diambil mereka dan dibantu diolah sampah plastik yang tidak bernilai ini jadi bahan bakar untuk motor perahu sendiri jadi terus berkelanjutan," ucapnya.

Kali ini, MoU yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan

kembali. Dimana chandra asri akan melakukan konservasi lingkungan atau alam untuk menanam mangrove. Sebab seperti diketahui bersama bahwa di Serang Utara khususnya masyarakat yang memiliki tambak sudah terkena abrasi luar biasa.

"Selain tujuannya untuk decarbonisasi, tentu juga konservasi mangrove untuk edu wisata dan meningkatkan sisi ekonomi. Karena dari mangrove ini bisa dibuat makanan, minuman dan lainnya," ujarnya.

Tatu berharap karena chandra asri programnya berkelanjutan. Program tersebut tidak setahun selesai, karena dari pemeliharaan hingga tumbuh besar dimana biaya tersebut dari chandra asri. "Ini tentunya sisi lainnya jadi peluang pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Serang," ucapnya.

Tatu memaparkan, untuk target pertama akan mangrove ditanam dilahan seluas 100 hektare. Nantinya dengan sekda dan dinas terkait akan ke lapangan untuk menentukan dimana lokasi yang tepat agar bisa satu hamparan 100 Hektare untuk mempermudah pelaksanaan dan perawatannya.

"Kalau keseluruhan sangat luas, yang abrasi sangat luas. Hanya saya menyampaikan di utara ini ada zona industri jangan sampai di tempat zona industri. Khawatir saat izin lokasi diminta perusahaan ini akan terganggu. Harus ditempat yang aman dan dibutuhkan masyarakat," tuturnya.

Direktur Legal Eksternal Affairs PT Chandra Asri Pasifik (CAP) Edi Riva'i mengatakan kali ini program yang akan dilakukan cukup panjang. Karena terkait dengan program pemerintah pusat dan daerah, yaitu untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya abrasi dan bahaya lingkungan lainnya. "Ini sejalan dengan program Chandra Asri Pasifik," ujarnya.

Untuk awal kata Edi, akan dilakukan di lahan seluas 100 Hektare. Untuk itu pihaknya akan mapping lokasi yang tepat dulu, kemudian memberikan dampak seluas luasnya kepada Kabupaten Serang dan lingkungan.

“Mulai pelaksanaan tergantung tim dimana lokasi yang paling tepat dan juga tentunya dapat berkelanjutan. Secara berkelanjutan, sampai 2045-2060 mulai kecil sampai besar,” ucapnya. (Aep)

Jelang Idul Adha, Hewan Kurban di Cilegon Divaksin PMK

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Kabar6-Jelang Idul Adha atau hari raya kurban, sejumlah hewan divaksin serta diperiksa kesehatannya. Hal ini dilakukan, untuk menghindari Serengan berbagai penyakit, seperti penyakit mulut dan kuku.

Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) DKPP Kota Cilegon Dina Safitri mengatakan, menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak hewan ternak masuk dari luar daerah ke Kota Cilegon. Sebagian besar hewan kurban yang diperjualbelikan berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Lampung.

“Untuk mengantisipasi menyebarnya penyakit mulut dan kuku,

DKPP melalui tim peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan vaksinasi (Penyakit mulut dan Kuku) di beberapa lokasi pemeliharaan sapi potong. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap serangan penyakit, terutama PMK,” jelas Dina, Selasa, (21/05/2024). **Baca Juga: [Wakili Generasi Muda, Cinta Laura Blak-blakan Bicara Air di WWF Bali](#)

Tim Vaksinasi DKPP Kota Cilegon terdiri dari drh. Dina Safitri, drh. Abraham, Hafid Dasuki, Rangga, Driantama dan drh. Tiara selain memberikan vaksinasi PMK, juga memberikan desinfektan dan obat cacing kepada para peternak.

“Diharapkan dengan adanya vaksinasi PMK akan mencegah penyakit sehingga nantinya konsumen hanya akan mendapatkan hewan kurban yang sehat dan memenuhi ketentuan syarat syariat Islam. Dengan begitu, warga yang menerima manfaat juga Insya Allah selamat dari penyakit,” terangnya.

Sementara itu, Owner Villa Tani dan Ternak Cikerei, Hari Bowo, mengaku siap dilakukan pemantauan maupun pemeriksaan terhadap hewan miliknya.

“Jadi kalau untuk kesehatan hewan kita utamakan, makanya dari harga itu kita cenderung di atas lapak lapak hewan karena kita benar-benar mengutamakan kualitas hewan,” ucapnya.(Dhi)

**Gerakan Pangan Murah di
Kabupaten Serang Jaga
Stabilitas Harga Jelang**

Lebaran

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Kabar6– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga menjelang [Lebaran 2024](#).

Kali ini, GPM digelar di halaman Kecamatan Kragilan pada hari ini. Dalam GPM tersebut, ratusan masyarakat antusias untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran mulai dari beras, daging, daging ayam, telur, sayur-sayuran dan lainnya.

Kepala DKPP Kabupaten Serang, Suhardjo, mengatakan bahwa GPM merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. GPM fokus pada pengendalian harga pangan agar tetap terjangkau dan mencegah lonjakan harga yang dapat memberatkan konsumen.

“GPM bulan Ramadan diharapkan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Suhardjo.

Suhardjo menjelaskan bahwa kebutuhan pangan meningkat

menjelang dan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama bulan Ramadan. Meningkatnya kebutuhan ini dapat menyebabkan gejolak harga.

****Baca Juga:** [Arus Mudik Idul Fitri 2024, Puskesmas di Cilegon Buka Selama Jam Kerja](#)

“Diharapkan, GPM mengurangi pengeluaran masyarakat yang kurang mampu, sekaligus mengurangi gejolak harga, yang berarti akan mengurangi inflasi di masyarakat,” terangnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan DKPP Kabupaten Serang, Mumun Munawwaroh, mengatakan bahwa GPM dilaksanakan atas kerja sama antara Pemkab Serang, Badan Pangan Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog Sub Divre Serang.

Lalu Rajawali Nusindo (RNI), PT Wilmar Padi Indonesia, Bank bjb Banten, PT. Charoen Pokphand dan KTNA Kabupaten Serang. GPM merupakan bagian dari rangkaian kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam rangka HBKN Idul Fitri 2024.

“GPM dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di berbagai provinsi maupun kabupaten kota. Acara dimulai dengan zoom bersama badan pangan nasional dan seluruh kabupaten kota penyelenggara GPM, dilanjutkan dengan pembukaan GPM di masing-masing lokasi,” ungkap Mumun.(Aep)

Ketua DKPP: Terdapat Problematika Etik pada Pemilu 2024

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Kabar6-“Problematika etik menjadi fokus penting DKPP yang mungkin timbul dalam konteks Pemilu 2024,” demikian paparan Heddy Lugito dalam seminar nasional di Universitas Moestopo, Sabtu 16 Maret 2024.

Argumen tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, karena memandang DKPP memang memiliki peran yang sangat penting dalam menangani problematika etik yang mungkin timbul dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab dalam setiap proses demokratis, termasuk Pemilu, masalah etika dan kepatuhan terhadap aturan serta standar moral sangatlah vital untuk menjaga integritas, transparansi, dan legitimasi proses demokratis itu sendiri.

Menurut Heddy Lugito, saat ini DKPP RI memiliki tugas untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

**Baca Juga:[Siapa Titi Khoiriah? Wanita Cantik Yang Bakal Maju di Pilkada Kota Tangerang](#)

Karena itu untuk menjalankan tugas tersebut DKPP memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi pada Pemilu 2024.

“Dan dengan begitu, DKPP RI bisa menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu,” lugas Hedy Lukito pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana (PPs) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tersebut.

Saat ini etika telah menjadi salah satu isu yang diperdebatkan masyarakat pada Pemilu 2024 ini baik di media sosial maupun forum diskusi yang membuatnya menjadi salah satu perbedaan mencolok Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya dan menjadi salah satu bentuk kepedulian dan harapan masyarakat terhadap pemilu yang demokratis.

“Tiba-tiba etika menjadi wacana yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan publik di media sosial maupun forum-forum diskusi, bagaimana beretika dalam bernegara,” ungkap Hedy Lukito.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas merupakan satu dari lima syarat terwujudnya Pemilu demokratis di Indonesia. Empat syarat lainnya adalah regulasi yang baik, birokrasi netral, peserta yang taat aturan, dan pemilih yang cerdas dan partisipatif.

Berdasarkan data KASN, pada periode 2015-2020, terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu modusnya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan.

Alasan lain yang biasa terjadi adalah karena adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon, kurangnya pemahaman aturan tentang netralitas ASN, hingga adanya intervensi dari pimpinan atau atasan. Selain pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, politik uang (money politics) juga kerap terjadi pada Pemilu.

“Dan sampai 13 Maret 2024 Bawaslu ada 140 pelanggaran terkait netralitas ASN selama Pemilu 2024,” kata pria kelahiran Boyolali ini.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. Budiharjo, M.Si menjelaskan jika dalam Pemilu 2024, DKPP memang diharapkan dapat memainkan peran yang proaktif dan efektif dalam menangani problematika etik yang mungkin timbul.

Dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam seluruh proses pemilu, DKPP bisa berkontribusi pada terwujudnya pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

“Saat ini kita masih memberikan nilai terbaik untuk DKPP. Sebab saat ini belum ada keputusan DKPP yang membuat rakyat tidak menerima. Karenanya, DKPP diharapkan untuk bisa terus menjadi wasit dan pengawas Bawaslu dan KPU yang baik,” ujar Prof Budiharjo.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur PPs Universitas Moestopo, Prof. Dr. Triyuni Soemartono, M.M. Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, DKPP dapat berperan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang etika kepada penyelenggara pemilu.

“Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya etika dalam menjalankan tugas dan membantu mencegah terjadinya pelanggaran,” kata Prof. Triyuni.

Tak berhenti sampai disitu, dalam setiap Pemilu, DKPP pun juga memiliki peran menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik. Pendekatan mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Dan sebagai bagian untuk penciptaan Pemilu yang berkualitas, DKPP dan Universitas Moestopo pun menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan demokrasi dan

integritas Pemilu di Indonesia.

MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Budiharjo. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama antara DKPP Universitas Moestopo ditandatangani oleh Sekretaris DKPP David Yama dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Moestopo Dr. Bayquni.

Ruang lingkup MoU dan PKS tersebut antara lain riset/penelitian, forum ilmiah/seminar/diskusi, magang/on job training/praktek kerja, produksi dan publikasi karya ilmiah, narasumber/pengajar tamu, pendampingan kajian data pemilu, dan kegiatan lainnya.

“Menjadi penyelenggara Pemilu bukan pekerjaan mudah. Selain harus taat hukum, penyelenggara juga diikat oleh etika,” pungkas Ketua DKPP RI, Heddy Lugito.(red)

Partai Gelora Bakal Laporkan Bawaslu Kabupaten Tangerang ke DKPP

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Kabar6-DPD [Partai Gelora](#) Kabupaten melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan legislatif 2024. Laporan resmi telah disampaikan kepada Bawaslu setempat terkait adanya temuan berkurangnya suara dukungan bagi caleg DPR-RI dan suara Partai Gelora di sejumlah tempat pemungutan suara.

“Kami menilai Bawaslu lamban dalam melakukan pencermatan atas laporan kami,” kata Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Tangerang, Sukardin, Sabtu (9/3/2024).

Ia jelaskan, ahwa berdasarkan bukti C-Hasil di TPS 08 Desa Dukuh, Cikupa ditemukan suara caleg berkurang dari enam suara menjadi tiga suara.

Kemudian, lanjut Sukardin, bukti C- Hasil di TPS 025 Desa Kadu Jaya, Curug, ditemukan suara partai dan suara caleg Gelora berkurang dari tujuh suara menjadi empat suara.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu, menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

**Baca Juga: [Dugaan Korupsi Timah, Rp10 Miliar dan SGD 2 Juta Disita](#)

“Berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Wewenangan Bawaslu wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran,” terangnya.

Sukardin pastikan segera berkoordinasi dengan Tim Advokasi Dewan Pengurus Nasional Partai Gelora Indonesia. Ia bakal melaporkan hasil temuan dugaan pelanggaran atas berkurangnya suara caleg dan partai Gelora.

“Jika laporan kami tak direspons, kami akan membawa persoalan ini ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan komisioner [Bawaslu](#) Kabupaten Tangerang tidak merespon upaya konfirmasi. Muslik sebagai pimpinan lembaga pengawas justru memberikan nomor telepon komisioner lainnya yang juga tidak memberikan klarifikasi.(yud)

Gerakan Moral, UIN Jakarta:

Kekuasaan Keluarga Jangan Diatasnamakan Kepentingan Nasional

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Kabar6-Manuver politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi jelang penyoblosan Pemilu 2024 mendapat sorotan dari berbagai kampus di Tanah Air. Jokowi dianggap telah melenceng dari umumnya pengelolaan pemerintahan serta demokrasi yang beradab dan beretika.

Gerakan moral terbaru adalah dari alumni dan civitas akademika [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta](#) di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

“Mendesak penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Saiful Mujani, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2/2024).

Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil dan jujur. Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya. Serta kuat dalam

menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun.

“Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia,” terang Saiful.

Kedua, mendesak presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh konstantan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan.

Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu.

“Mendesak Presiden agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional,” tegasnya.

****Baca Juga: [HMI Protes Calon Anggota KPU Lebak Terpilih 2024-2029](#)**

Saiful melihat aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang negarawan. Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintah secara nasional, tapi juga menimbulkan ketidaksolidan dan ketidaknyamanan anggota kabinet.

Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulang kali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan [pemilu/pilpres 2024](#) ini.

“Tapi hari demi hari yang diterima adalah kepiluan dalam pelaksanaan pemilu/pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita.

Pengelolaan keadaban atau akhlak demokrasi ini sudah semestinya tidak dipandang sekedar seperangkat aturan tertulis. Aturan tentang boleh tidak boleh. Lebih dari itu, keadaban atau akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan baik/manfaat atau tidak baik/mudharat bagi kepentingan masyarakat.

Sejak putusan MK atas uji materi No 90/2023 ditetapkan, keadaban atau akhlak demokrasi kita terus menerus merosot. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban/akhlak berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara.

Kelima, mendesak Kepolisian RI untuk bersikap independen dan professional. Tidak menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara.

Polri tidak mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. Seperti yang menimpa saudara Aiman Witjaksono, Palti Hutabarat dan kini Butet Kartaredjasa. Polri adalah alat negara untuk menegakan hukum dan ketertiban. Bukan alat presiden.

“Maka dan oleh karena itu, sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu,” tutup Saiful.(yud)

HMI Protes Calon Anggota KPU Lebak Terpilih 2024-2029

written by Kabar 6 | 17 Oktober 2024



Kabar6-[Komisi Pemilihan Umum \(KPU\) RI](#) telah menetapkan 5 orang calon anggota KPU Kabupaten Lebak terpilih periode 2024-2029.

Kelima calon anggota KPU Lebak terpilih itu adalah Agus Sugama, Ade Jurkoni, Deni Wahyudin, Dewi Hartini, dan Iim Muhaemin.

Namun, calon komisioner KPU Lebak hasil rekrutmen itu mendapat sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak dengan alasan beberapa di antara kelima orang tersebut pernah diberi sanksi peringatan oleh DKPP.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa memasang baliho di depan Kantor KPU Lebak, Jalan Abdi Negara, Rangkasbitung, Jumat (2/2/2024). Di baliho tersebut tertulis "HMI Cabang Lebak Boikot Kantor KPU Lebak".

"Ini bentuk rasa duka kami terkait hasil rekrutmen calon anggota KPU Lebak yang penuh intrik kepentingan," kata Ketua

HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya.

****Baca Juga: [Untuk Pemilih Pemula, Catat! Berikut Tata Cara Nyoblos Pemilu 2024](#)**

Penolakan HMI karena beberapa calon anggota [KPU Lebak](#) terpilih pernah mendapat sanksi peringatan oleh DKPP. Padahal Ratu meyakini, masih banyak calon anggota KPU yang juga berintegritas.

“Kami yakin Lebak tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, jadi kenapa meloloskan orang-orang yang sebelumnya pernah diberi peringatan,” sebut Ratu.

Selain beberapa calon anggota KPU Lebak yang pernah mendapat sanksi DKPP, mahasiswa juga menolak calon anggota KPU yang bukan berdomisili di Kabupaten Lebak.

“Apakah Kabupaten Lebak kekurangan SDM sehingga harus impor dari daerah lain? Kami rasa tidak, Lebak sangat banyak memiliki SDM yang mumpuni berkontribusi dalam menyukseskan Pemilu,” tegas Ratu.(Nda)

Besok, DKPP Gelar Sidang Putusan Kode Etik Bawaslu Tangsel

written by Redaksi | 17 Oktober 2024



Kabar6-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada esok hari Rabu 17 Februari 2021.

Sidang etik itu akan dilaksanakan sekira pukul 09.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/2/2021) pukul 09.30 WIB.

Pembacaan putusan untuk Bawaslu Tangsel akan dilakukan berbarengan dengan empat penyelenggara Pemilu lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DKPP, Arif Ma'ruf mengatakan, semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang sidang DKPP Jakarta, sidang di tempat (sidang pemeriksaan di daerah), dan sidang jarak jauh melalui fasilitas video conference.

“Sidang putusan merupakan sidang terakhir atau final dari sebuah perkara yang telah diperiksa,” kata Arif, dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (16/2/2021).

Dalam rangka pencegahan dan penyebaran Covid-19, Arif

menerangkan, sidang akan digelar tanpa kehadiran Pengadu, Teradu, Pihak Terkait maupun pengunjung.

**Baca juga: [Tampung Aspirasi Pelaku Usaha, Kadin PB Tangsel Fokus Sinergi Dengan Pemerintah](#)

Namun, dikatakan Arif, semua pihak dan masyarakat dapat menyaksikan jalannya persidangan dan dapat memutar kembali siaran tersebut kapan saja.

“Ini juga merupakan bentuk transparansi dari DKPP terhadap proses persidangan kode etik penyelenggara Pemilu,” tutupnya. (eka)